

MONEY POLITIC PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA

Hj. Rahmatiah HL.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Para calon wakil rakyat hanya merakyat pada saat masa kampanye saja. Pendekatan yang biasanya dilakukan untuk mengambil hati rakyat, khususnya ketika menjelang pencoblosan di bilik suara ialah "money politic". Akan tetapi, para calon wakil rakyat tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam kasus tersebut. Masyarakat idealnya dapat berfikir lebih pintar dan logis dalam menyikapi fenomena tersebut. Karena pemilu merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih wakil rakyat secara langsung berdasarkan keputusan ideal dan rasional tanpa intervensi materi atau *money politic*.

Kata Kunci:

Partisipasi Politik, Politik Uang, Pemilu Jujur dan Adil

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi dan rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah serta kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan, sehingga diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan bahwa semangat Pemilu itu dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu sesuai aturan perundang-undangan dan penghormatan hak-hak politik setiap warga Negara. Gamawan menambahkan bahwa upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta untuk mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggaraan Pemilu dan peserta Pemilu semata namun, harus di dukung oleh seluruh pemangku kepentingan pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.¹

Menurut Budiardjo, (2009:367) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara yang secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Dengan demikian, partisipasi politik erat kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sedangkan menurut Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* (Budiardjo,1996:183) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum

Partisipasi memilih pada pemilu setelah reformasi terus mengalami penurunan. Berturut-turut, Pemilu 1999 mencatatkan angka partisipasi 92,74 persen, 2004 mencapai 84,07 persen, 2009 mencapai 79 persen. Survei Institut Riset Indonesia berlangsung pada 4 Desember 2013 hingga 8 Januari 2014 di 34 provinsi. Metoda yang digunakan adalah multi-stage random sampling, dengan melibatkan 1.700 responden. Survei dilakukan melalui wawancara berpedoman kuesioner, menggunakan tingkat toleransi kesalahan 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.²

Jika ini menjadi tren global, pertanyaannya: apa yang menjadi pemicunya? Jawabannya tentu bisa dikembalikan pada sikap masyarakat yang sudah muak dengan praktik demokrasi yang terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, dengan meninggalkan berbagai dampak yang selama ini harus masyarakat alami. Fenomena golput yang terus meningkat dalam Pilkada juga membuktikan hal yang sama. Rakyat sudah paham betul, bahwa proses-proses perubahan yang terjadi melalui pemilihan langsung, baik legislatif maupun eksekutif, nyatanya tidak mengubah sedikit pun nasib mereka. Rakyat sadar, bahwa pergantian orang tidak akan mengubah apa-apa. Terlebih dengan maraknya money politic

¹ <http://www.pjminews.com/index.php?page=artikel&id=140>

² Sumber: Kompas.com, 28/2/2014

Money Politics, adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap.

Peneliti Indonesia Quick Research (Inquere) Institute, Ardi Arsyad jauh-jauh hari melansir survei yang dilakukannya dari 2009 hingga 2012, menunjukkan pengaruh uang dalam politik masih mendominasi, karena setiap tahunnya mencapai angka 20 persen. Sehingga Ardi menganggap kalau pada Pilgub Sulsel besar kemungkinan money politik akan tetap ada, bahkan akan menyentuh 22 persen jumlah pemilih di Sulsel. Sehingga, Direktur Riset Inquire Institute ini menyatakan politik uang adalah bagian dari kriminalisasi demokrasi. Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No 3 tahun 1999 jelas-jelas melarang adanya politik uang. Fenomena ini cenderung memanfaatkan Pemilukada kepala daerah sebagai ajang mendapat keuntungan sesaat.³

Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelaraskan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Tak sedikit, perubahan tersebut menjadi tantangan bagi parpol. Sebut saja masalah golongan putih (golput) yang muncul akibat ketidakpercayaan kelompok ini kepada parpol. Kini, di masyarakat juga muncul kecenderungan menginginkan figur-figur baru sebagai pemimpin. Tentunya, figur yang bisa membawa perubahan.

Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah letih menanti perbaikan dan bosan dengan janji-janji politik. Keberadaan golput di sejumlah pemilu maupun pemilihan kepala daerah makin mengukuhkan ketidakpuasan rakyat terhadap parpol. Secara global jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun lalu, memprediksikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol turun drastis. Ini akibat, masyarakat memandang komitmen

Panwas secara bertingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan juga saling mengawasi. Panwas pusat dapat menegur dan menghentikan Panwas provinsi. Demikian pula dari tingkat provinsi kepada kabupaten/kota atau Panwas kabupaten/kota kepada Panwas tingkat kecamatan. pertanggungjawaban parpol terhadap konstituennya masih sangat minim. Sehingga membuat para pemilih menjadi tidak respek terhadap parpol.

³ <http://rakyatsulsel.com/gowa-jadi-sasaran-empuk-money-politic-pilgub.html>

Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Dan sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa “berhutang budi” pada calon walikota yang memberikan uang tersebut.

Dengan cara *Money Politics* hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ini memperkecil kesempatan bagi kandidat perorangan yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat. Saat ini, Indonesia membutuhkan pergantian elite politik karena kalangan atas yang ada saat ini luar biasa korup. Penegakan hukum saat ini bisa dikatakan terhenti. Namun, format pemilu yang ada saat ini tidak memungkinkan partai kecil dan kandidat perorangan untuk tampil dalam kepemimpinan nasional.

Singkatnya, penyelenggara pemilu harus siap karena pemilihan presiden mendatang menampilkan perubahan kultur politik dari partai oriented ke kandidat oriented. Sementara dengan kondisi yang ada, kandidat presiden harus mampu mendanai partai sebagai imbal balik pencalonan. Akibatnya yang muncul adalah perlombaan untuk mengumpulkan uang dari pelbagai sumber dan tidak mendorong pemberantasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat

Penelitian mandiri yang dikaji oleh Ibrahim, “*Peran media terhadap perilaku pemilih di Sulawesi- Selatan*”. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa: pemilih bisa dipengaruhi oleh media. Menurut penulis kajian ini juga menarik dan masuk akal oleh karena partisipan tidak diiming-imingi sesuatu melainkan dengan sendirinya memutuskan pilihan lewat informasi yang ia terima melalui media, tidak dengan *money politic*. Namun gejala *money politic* mendominasi khalayak ramai utamanya masyarakat yang tingkat ekonominya sangat rendah.

Realitasnya, para calon wakil rakyat hanya merakyat pada saat masa kampanye saja, mendekati rakyat untuk mengambil hati rakyat dan ketika datang waktunya pemilihan umum, mulailah tradisi yang sering disebut “*money politic*” dipagi hari. Akan tetapi, dari permasalahan ini, kita tidak bisa selalu menyalahkan para calon wakil rakyat yang menggunakan trik *money politic*, seharusnya sebagai masyarakat harus berfikir lebih pintar bagaimana menyikapi dan berfikir lebih logis terhadap fenomena ini. Fenomena tersebut menarik untuk dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana sikap masyarakat terhadap *money politic*, dan mengkaji faktor kausalitas, ekonomi, kesadaran hukum, dan penerapan hukum yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam menilai *money politic*.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap *money politic* dalam menentukan pilihannya pada pemilu Legislatif tahun 2014 di Kabupaten Gowa?
2. Faktor-Faktor apakah yang memengaruhi sikap masyarakat terhadap *money politic* pada pemilu Legislatif di Kabupaten Gowa?

B. Pembahasan

1. Sikap Masyarakat terhadap money politik di Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa.

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer persegi ini memiliki enam gunung, dimana yang tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.⁴

Penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen dari total jumlah penduduk kabupaten Gowa sebesar 652.329 orang.

Berdasarkan data yang terkumpul ternyata responden berada pada kategori menurut tingkatan dan jenis kelamin. Bila dilihat dari pendidikan terakhir ada 30 % berpendidikan dasar; sekitar 30% berpendidikan menengah; pertama dan sekitar 40% responden berada pada tingkat sekolah menengah atas.

Di samping itu peneliti juga mengambil data dari masyarakat yang dikategorikan berdasarkan pekerjaan, yaitu: responden yang pekerjaan sehari-harinya bertani ada 10%; sopir sebanyak 60%; dan Ibu rumah tangga sekitar 70%. Adapun untuk kategori buruh, wiraswasta, dan lainnya peneliti belum sempat temukan di masyarakat Somba Opu disebabkan keterbatasan waktu dan peluang yang sangat sempit.

Kategori yang lain yang digambarkan dari tabel di atas adalah dari segi penghasilan responden, yaitu: masyarakat ini berada pada tingkat penghasilan sekitar Rp. 999.000/bulan sebesar 30%; Rp. 1.490.000/bulan sebanyak 30%; dan penghasilan responden yang berada dikisaran Rp. 1.999.000/bulan sebanyak 40%. Dan ternyata responden peneliti tidak ada yang berpenghasilan diatas Rp. 2.000.000/bulan. Begitu pula dengan penghasilan Rp. 1.000.000/bulan, dan Rp. 1.500.000/bulan.

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Regression | 1052.560 | 1 | 1052.560 | 27.604 | .001 ^b |
| 1 Residual | 305.040 | 8 | 38.130 | | |
| Total | 1357.600 | 9 | | | |

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa

- a. Dependent Variable: MONEY POLITIC
- b. Predictors: (Constant), SIKAP MASYARAKAT

Berdasarkan data di atas memperlihatkan terdapat keeratan yang signifikan sikap masyarakat terhadap money politik dengan nilai signifikansi 0,001% karena memenuhi syarat nilai $p < 0,005$.

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .881 ^a | .775 | .747 | 6.17495 | 2.698 |

- a. Predictors: (Constant), SIKAP MASYARAKAT
- b. Dependent Variable: MONEY POLITIC

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui nilai koefisien R Square 0,775 atau 77,5% sumbangan efektif independen variable (sikap masyarakat) terhadap dependen variable (*money politic*). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang sangat kuat pada sikap masyarakat terhadap money politic dengan kontribusi sebesar 77,5%.

2. *Faktor-Faktor Penyebab masyarakat menerima Money Politic*

Masyarakat kabupaten Gowa adalah masyarakat yang sudah masuk dalam kategori cerdas dalam memilih karena meskipun tingkat pendidikan mereka berada pada level dasar dan menengah namun untuk menentukan pilihan dan memilih calon legislatif masih mampu berfikir logis dan menggunakan nalar akibat dari berkembangnya media, informasi demikian pula dengan masyarakat bawah yang tergolong sopir, buruh dan ibu rumah tangga, memperlihatkan kecerdasannya dalam menentukan pilihan.

Dalam teori sikap dan perilaku manusia jika diperhadapkan dengan peluang untuk mendapatkan uang atau keberhasilan yang bersifat sesaat, tidaklah berlebihan jika dikatakan saling terikat dan melibatkan dua kepentingan yang berbeda, disadari ataupun tidak terbukanya krang demokrasi telah melahirkan budaya baru dalam masyarakat dimana sebagian orang memanfaatkan musim kampanye sebagai peluang untuk mendapatkan uang atau sejumlah materi dengan menawarkan suara kepada kontestan pemilu dengan mengenyampingkan bakat dan potensi sang calon. Demikianlah peluang yang ditawarkan "Pesta Rakyat" yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun dan tanpa disadari telah merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi dan etika berpolitik, alasannya pun sangat sederhana karena "Uang", dan karena uang pulalah membuat hati dan fikiran tertutup untuk menentukan Sikap dan bertindak menentukan pilihan berdasarkan akal sehat. Namun pada masyarakat kabupaten Gowa hal tersebut tidak terjadi karena masyarakat yang sudah tersentuh oleh informasi dan media yang semakin cepat diakses membuat masyarakat kabupaten Gowa sudah pandai menilai caleg mana yang akan dipilihnya. partai yang bertarung di kancah pilistik nasional maupun regional, kemampuan intelektual

bukanlah hambatan membuat orang ragu untuk mencoba menjajal peluang yang ada, yang ada adalah kesiapan sejumlah dana untuk mempengaruhi dan memikat hati calon pemilih agar pilihan jatuh kepadanya. Namun sekali lagi para Calon legislative hendaknya berfikir dan pertimbangkan sebaik-baiknya karena masyarakat memang butuh uang tetapi untuk menjual suara mereka masih ounya etika.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan sikap masyarakat terhadap *money politic*
- b. Faktor-faktor pengaruh sikap masyarakat terhadap *money politic* tidak memperlihatkan keeratan yang signifikan. Ini menandakan meski *money politic* selalu dilakukan oleh sebagian caleg yang tidak siap bertarung, masyarakat kabupaten Gowa adalah masyarakat yang sudah melek politik.

2. Saran/Implikasi Penelitian

Penelitian ini sangat berarti bagi para calon legislative yang menggunakan politik uang sebagai senjatanya ketika melakukan kampanye. Rupanya serangan fajar yang selalu terjadi tidak membuat caleg tertentu terpilih dan memiliki banyak suara, sehingga para caleg wajib memikirkan pola strategi jitu dan memasyarakat untuk memenangkan hati rakyat.

Daftar Pustaka

<http://www.pjminews.com/index.php?page=artikel&id=140>

Sumber: Kompas.com, 28/2/2014

<http://rakyatsulsel.com/gowa-jadi-sasaran-empuk-money-politic-pilgub.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa